

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan secara umum biasanya diartikan dalam aspek ekonomi, terutama berdasarkan pendapatan dalam bentuk uang dan keuntungan non-material yang diterima seseorang. Namun, secara lebih luas, kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang kekurangan berbagai hal, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang ada sejak lama, dan hingga saat ini belum ada formula sempurna untuk menanganinya. Strategi dalam mengatasi kemiskinan harus terus dikembangkan. (Edi Soeharto, 2005).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistika (BPS) pada bulan September 2022, terdapat 26.36 juta penduduk Indonesia yang berstatus miskin. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 mencapai 4 juta jiwa, dan di Kabupaten Bandung angka kemiskinan mencapai 263.000 jiwa. Salah satu faktor kemiskinan di Kabupaten Bandung adalah karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga jumlah penduduk miskin juga lebih banyak daripada daerah lain. Populasi masyarakat di Kabupaten Bandung sendiri berjumlah 3.775.279 jiwa.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang telah berjalan sejak tahun 2007. Program ini memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Melalui PKH, Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan dukungan sosial yang berkelanjutan.

Indikator keberhasilan dari Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya adalah Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH untuk mandiri dan secara sukarela melepaskan diri dari atau untuk tidak lagi menerima bantuan sosial Keluarga Harapan yang selama ini ia terima. Indikator itu harus menjadi target utama dalam Program PKH. Karena itu, target graduasi ini harus dilakukan secara terukur dan sistematis melalui pendampingan para SDM PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH), jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjebak pada *charity* semata dan terkesan hanya memberi bantuan yang sifatnya instan tanpa memikirkan masyarakat miskin yang akan datang. Program yang sifatnya *charity* bisa mensejahterakan masyarakat namun sifatnya hanya sementara. Berbanding terbalik dengan pandangan pemberdayaan, masyarakat miskin diberikan program agar mereka mempunyai daya (*power*) sehingga setelah menerima program, para KPM bisa keluar dari garis kemiskinan. Program ini berorientasi ke depan dan sifatnya lebih permanen. Namun prosesnya membutuhkan waktu lama dan programnya harus berkelanjutan.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan itu menjadi suatu tindakan yang nyata. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Maka dari itu, ide utama

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Soeharto, 2005).

Hakikat pemberdayaan merupakan bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya serta membetulkan kehidupannya sendiri. Sebutan mampu disini memiliki arti: berdaya, mengerti, termotivasi, mempunyai peluang, berenergi serta memiliki kesempatan, bertenaga, mampu bekerjasama, mengetahui alternatif, sanggup mengambil keputusan, berani mengambil resiko, sanggup mencari serta menangkap data dan sanggup berperan sesuai inisiatif. Sebaliknya indikator pemberdayaan menurut Suharto yaitu memiliki 4 perihal, yaitu aktivitas yang terencana serta kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas untuk kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas (Anwas, 2014)

Salah satu model pemberdayaan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial penerima manfaat Program Keluarga Harapan Graduasi adalah kewirausahaan sosial. Pendekatan kewirausahaan sosial adalah pendekatan pemberdayaan yang dapat menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk pemecahan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Model ini dapat dikembangkan secara terintegrasi, dengan sistem usaha konvensional, berjalan beriringan ataupun secara terpisah (Masturin, 2015).

Kewirausahaan sosial adalah pengembangan dari konsep kewirausahaan dasar yang telah diakui sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

terutama untuk menangani masalah social (Noruzi et al., 2010). Walaupun memiliki banyak aspek, kewirausahaan pada dasarnya adalah serangkaian tindakan individu dalam mengelola kegiatan ekonomi dengan mencari berbagai peluang untuk menciptakan nilai. Dalam konteks kewirausahaan sosial, nilai yang menjadi fokus utama adalah manfaat sosial, karena kewirausahaan sosial sangat menekankan pada cara menghasilkan gagasan-gagasan inovatif yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Membangun wirausaha sosial atau *social entrepreneurship* saat ini menjadi trend yang berkembang di kalangan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Para pendiri dan karyawan dari *social entrepreneur* ini berperan sangat penting dalam memperbaiki berbagai permasalahan sosial yang kita hadapi saat ini. Menggunakan teknologi dan inovasi terkini, para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menginspirasi ini terus berupaya memberikan dampak yang meningkatkan kualitas hidup di sekitar mereka.

Secara prinsip, program kewirausahaan sosial bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat. Contohnya, masalah ekonomi, kesehatan masyarakat, pendidikan, lingkungan, kebersihan, dan lain sebagainya. Para pelaku usaha terus berusaha mengisi kesenjangan dalam kehidupan komunitas dengan cara inovatif dan melalui percobaan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu, upaya ini juga berfokus pada membantu komunitas membangun kepercayaan terhadap identitas lokal mereka dan memperkuat kepercayaan masyarakat lokal terhadap kemampuan mereka untuk menjadi mandiri secara finansial. Kementerian sosial

melaksanakan pemberdayaan dalam bentuk kewirausahaan sosial melalui Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) yang telah dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia.

Kementerian Sosial meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial yang memiliki tujuan menciptakan kemandirian serta memutus ketergantungan keluarga miskin dan rentan terhadap bantuan sosial (Kepdirjendayasos Nomor 651/045.3/KPTs/10/2021) Kementerian Sosial mengembangkan tugas melaksanakan berbagai program inovasi termasuk pemberdayaan sosial di samping perlindungan dan jaminan sosial. Kemandirian dapat dicapai jika penerima bantuan memiliki jiwa kewirausahaan sosial yang semakin menguat. Program kewirausahaan sosial (ProKus) merupakan program yang menyoar keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah graduasi atau keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar terbentuknya kemandirian secara ekonomi sehingga mereka tidak kembali terpuruk secara ekonomi setelah tidak lagi mendapat bantuan melalui PKH.

Hal itu di lakukan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berdaya dengan usaha yang ia rintis. KPM PKH tidak hanya terfokus pada profit tetapi manajemen usahanya juga harus di perhatikan seperti kemasan produk yang menarik, strategi pemasaran yang menggunakan digital marketing dan lainnya. Kebijakan kementerian sosial tentang ProKus merupakan suatu kebijakan yang inovatif dan berkembang. KPM menjadi graduasi atau terhubung dengan Kementerian/Lembaga yang menangani perkerpasian, UKM, pembiayaan kredit usaha mikro dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga

terkait lainnya untuk pengembangan pemasaran hingga ekspo hasil usaha ProKus (Setiawan, 2020).

Program Kewirausahaan sosial (ProKus) ini telah diselenggarakan diberbagai wilayah di Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Bandung. Program Kewirausahaan sosial (ProKus) di Kabupaten Bandung ini diselenggarakan di 9 Kecamatan 48 Desa dan 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bidang usaha yang diselenggarakan yaitu terdiri dari 3 bidang fashion/konveksi, 1 bidang kriya, 1 bidang kuliner dan 1 bidang jasa serta dimentori oleh 6 mentor yang telah diseleksi. Di Kecamatan Soreang terdapat 13 KPM yang melaksanakan Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) mayoritas KPM di Kecamatan Soreang bergerak dibidang Kuliner/ Warung klontongan.

Berdasarkan hasil temuan awal, diketahui bahwa para penerima manfaat yang mengikuti Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang sudah mencapai graduasi seacara mandiri melalui Program Keluarga Harapan. Hal ini telah menunjukkan keberhasilan dari tujuan program tersebut yaitu meningkatkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar KPM dapat graduasi secara mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan mampu untuk meningkatkan standar kehidupan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan kepada para penerima manfaaat melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang untuk menggambarkan dan mengetahui bagaimana pemberdayaan pada KPM PKH melalui Program

Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung ini sehingga bisa berhasil melalui proses pemberdayaan yang mereka lakukan. Proses pemberdayaan tersebut meliputi tahapan-tahapan pemberdayaan yang disampaikan oleh Soekanto dalam Dedeh (2019) yaitu pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Peneliti ingin mengetahui bagaimana keberhasilan tersebut bisa tercapai, apakah keberhasilan tersebut telah membuat para penerima manfaat merasa berdaya dan apa saja hambatan yang terdapat dalam proses pemberdayaan melalui tahapan-tahapan yang dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Hari Harjanto Setiawan, dkk terkait dengan Program Kewirausahaan Sosial (2021). Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan program yang cukup singkat sekitar 3 - 4 bulan dan pendampingan secara informal setelah program ini selesai, Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) ini dapat menaikkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun baru mengembalikan kondisi pendapatan semula pada saat sebelum pandemi covid-19 terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan pemberdayaan pada keluarga penerima manfaat program kewirausahaan sosial melalui program kewirausahaan sosial (ProKus) di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Program Kewirausahaan sosial (ProKus) yang dilaksanakan di Kecamatan Soreang adalah salah satu ProKus yang pelaksanaannya di bawah binaan dari Poltekesos Bandung. Peneliti berharap dengan

adanya pemberdayaan yang dilakukan Kementerian Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat membantu perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian para penerima manfaat tersebut. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan agar proses maupun pemberdayaan dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan *role model* dalam program yang sama maupun program atau inisiatif pemberdayaan lainnya. Peneliti memulai penelitian dengan judul “Pemberdayaan Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Melalui Program Kewirausahaan Sosial Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah “Pemberdayaan Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Melalui Program Kewirausahaan Sosial Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung”. Selanjutnya fokus penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana persiapan (*engagement*) dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pengkajian (*assessment*) dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana perencanaan alternatif program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?

4. Bagaimana pemformulasian rencana aksi dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana pelaksanaan program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
6. Bagaimana monitoring dan evaluasi program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
7. Bagaimana terminasi program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami secara detail dan mendalam perihal Pemberdayaan Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Melalui Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengkaji tentang:

1. Persiapan (*engagement*) dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
2. Pengkajian (*assessment*) dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
3. Perencanaan alternatif program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

4. Pemformulasian rencana aksi dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
5. Pelaksanaan program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
6. Monitoring dan Evaluasi program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
7. Terminasi program dalam pemberdayaan pada KPM melalui Program Kewirausahaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan dan kontribusi bagi pengembang praktek pekerjaan sosial khususnya mengenai Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) terutama bagi pengembangan ilmu di dalam bidang pekerjaan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pemecahan masalah tentang pelaksanaan Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) dan sebagai bahan dasar untuk usulan pertimbangan membuat kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penelitian sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang tinjauan penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian, tinjauan tentang pemberdayaan, tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dan tinjauan tentang Kewirausahaan Sosial.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakuka, langkah – langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisa kelayakan, dan indicator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SASARAN, memuat tentang kesimpulan dan saran.